

**TINJAUAN KONDISI PENDUDUK KOTA
MELALUI PENDEKATAN KUALITAS HIDUP
(THE QUALITY OF LIFE APPROACH):
STUDI KASUS KOTAMADYA PADANG,
SUMATERA BARAT**

Edie Toet Hendratno

Menurut penulis artikel ini, salah satu aspek dari pembangunan kota adalah masalah kualitas hidup dari masyarakatnya. Sehingga untuk melihat seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu kota harus dilihat melalui kualitas hidup masyarakat kota tersebut dalam kurun waktu tertentu. Dalam membahas artikel ini, Edie Toet Hendratno mengambil masalah kualitas hidup masyarakat Kotamadya Padang, Sumatera Barat, antara rentang waktu tahun 1990 sampai dengan tahun 1994. Kajian masalah ini merupakan hasil dari studi literatur yang telah dilakukan.



Pengantar

Pembicaraan atau kajian mengenai kondisi masyarakat kota sangat penting untuk dilakukan mengingat peran kota sebagai pusat dari pemerintahan, kegiatan ekonomi dan kompleks dari berbagai masalah sosial. Pengaruh pembangunan kota kepada lingkungan lebih besar dibanding pengaruh pembangunan desa. Pertama karena pembangunan kota merubah keadaan fisik lingkungan alam menjadi lingkungan buatan manusia. Kedua, terhadap perubahan lingkungan sosial masyarakat kota, yang semula hidup lebih akrab dengan hubungan antar manusia, saling tolong menolong menjadi masing-masing orang berupaya memecahkan masalahnya sendiri-sendiri. (Emil Salim: 1991, hal. 3-9).

Kota dalam pengertiannya adalah sebuah tempat pemukiman yang permanen dengan tingkat kepadatan penduduknya yang mencolok, yang corak

masyarakatnya heterogen dan lebih luas daripada sebuah keluarga atau klen. (Suparlan: 1991, hal. 7).

Salah satu aspek dari pembangunan kota adalah masalah kualitas hidup dari masyarakatnya. Sehingga untuk melihat seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu kota harus dilihat melalui kualitas hidup masyarakat kota tersebut dalam kurun waktu tertentu, untuk melihat proses perkembangannya.

Dengan mengambil studi kasus Kotamadya Padang, Sumatera Barat, tulisan ini berupaya mengangkat masalah kualitas hidup masyarakat Kotamadya Padang yang rentang waktunya antara tahun 1990 sampai dengan tahun 1994. Bahan dari tulisan ini sepenuhnya merupakan hasil dari studi literatur yang telah dilakukan.

Pengukuran Kualitas Hidup

Konsep mengenai ukuran tingkat kualitas hidup, telah dikemukakan sebelumnya oleh Ben-Chich Liu melalui suatu studinya pada tahun 1970 yang melihat kualitas hidup 243 kota metropolitan di Amerika Serikat. (Adward Krupat: 1985, hal. 28). Dalam mengukur kualitas hidup penduduk kota tersebut, Ben-Chich-Liu menggunakan 5 komponen dasar yaitu: (a) Komponen Ekonomi, pengukuran pada tingkat pendapatan daerah, (b) Komponen Politik, pengukuran pada profesionalisme pemerintah lokal, partisipasi penduduk dalam kegiatan sosial masyarakat, (c) Komponen Lingkungan, pengukuran pada kualitas udara, air dan suara, (d) Komponen Kesehatan dan Pendidikan, pengukuran pada sarana kesehatan serta tingkat kelahiran dan kematian bayi, tingkat pendidikan penduduk dan sarana pendidikan, serta (e) Komponen Sosial, pengukuran pada diskriminatif gender, tingkat kriminalitas yang terjadi di masyarakat.

Dari kelima komponen tersebut, semua komponen akan saya ukur dengan menyesuaikan dan memodifikasi data yang tersedia. Komponen-komponen tersebut adalah (a) Komponen Ekonomi, dengan pengukuran laju pertumbuhan penduduk domestik bruto regional dan perkembangan jumlah perusahaan dagang yang ada, (b) Komponen Politik, dengan pengukuran pada tingkat pendidikan pegawai negeri, jumlah pemilih dan suara yang masuk pada pemilihan umum, (c) Komponen Lingkungan, dengan pengukuran kualitas air sungai, (d) Komponen Kesehatan dan Pendidikan, dengan pengukuran sarana kesehatan (Puskesmas) yang tersedia dan tenaga medis, kelahiran bayi mati atau hidup dan sarana pendidikan yang ada. Terakhir adalah Komponen Sosial, dengan pengukuran pada jumlah peristiwa kriminal

yang terjadi di masyarakat. Kesemua komponen pengukuran tersebut, akan saya sajikan dalam bentuk data kuantitatif berupa tabel-tabel. Namun demikian, sebelum saya menguraikan pengukuran kualitas hidup masyarakat kotamadya Padang, ada baiknya bila sedikit kita mengenal mengenai kotamadya Padang tersebut.

Sekilas Kotamadya Padang

Kotamadya Padang terletak pada 0 54' - 1 08 ' LS dan 100 17' - 100 34' BT dengan luas daerah seluruhnya 694.96 Km². Tingkat kemiringan tanahnya beraneka ragam, mulai dari daerah perbukitan hingga daerah perkotaan dengan rincian 180 Km² yang efektif (digunakan sebagai tempat berdirinya bangunan, jalan dan lahan pertanian), sedangkan 434.63 km² merupakan daerah perbukitan.

Selain sebagai Kotamadya, kota Padang juga merupakan kota dimana terletak pusat pemerintahan Propinsi Sumatera Barat. Batas-batas wilayahnya meliputi: di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok; di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan dan di sebelah Barat membentang Samudera Indonesia.

Kota Padang dengan pelabuhan Muaro-nya diperkirakan telah mulai berkembang sejak abad ke-14, bersamaan dengan masa kejayaan Kerajaan Pagaruyung atau kerajaan Minangkabau. Pada saat itu kota Padang menjadi sebuah kota Pelabuhan dagang sekaligus sebagai pintu gerbang tempat turunnya rempah-rempah dari daerah pedalaman, disamping 3 pelabuhan lainnya yang ada yakni Penyalinan, Pariaman dan Pelabuhan Tiku.

Bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda pada saat itu berupaya masuk untuk melakukan perdagangan. Sebagai salah satu negara imperialis yaitu Belanda tidak hanya berdagang, tetapi berupaya pula menguasai Kota Padang. Untuk itu Belanda berusaha mempengaruhi penguasa Kerajaan Minangkabau. Atas usaha itu Abraham Verpreet kepala VOC saat itu sampai diberi gelar "Yang Dipertuan Gagah" dan sekaligus menjadi "Wakil Mutlak Raja" Minangkabau. Akibat dari hal ini Abraham Verpreet berhak mengadakan perjanjian dengan mengatasnamakan Raja.

Upaya mengukuhkan kekuasaan VOC di Kota Padang dilakukan dengan mendirikan benteng/loji di kawasan Muaro. Hal ini mengakibatkan kemarahan segenap rakyat kota Padang. Maka pada tanggal 7 Agustus 1969 malam, ribuan rakyat Pauh, Koto Tengah dan sebagian rakyat di kota Padang menyerang benteng/loji Belanda yang terdapat di Muaro tersebut.

Untuk mengingat peristiwa tersebut, maka melalui Surat Keputusan Wali-kotamadya Padang Nomor: 188.45.2.25/SK.SEK/1986 ditetapkan tanggal 7 Agustus merupakan "Hari Jadi" Kota Padang. (Pemda Kodya Padang: 1995, hal. 34-39).

Berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 1990, penduduk Kota-madya Padang berjumlah 703.893 jiwa. Dari jumlah ini 353.585 adalah wanita dan 350.308 pria. Laju pertumbuhan penduduknya rata-rata 2.76% per tahun. Jika dibandingkan dengan luas wilayahnya (694.96 Km²) maka kepadatan penduduk Kotamadya Padang mencapai 1.013 jiwa per Km² dan menempati kotamadya/kabupaten terpadat di Propinsi Sumatera Barat. (Pemda Kodya Padang: 1994, hal. 25).

Sebagai kota dimana terletak pelabuhan Samudera sejak dahulu, para pedagang rempah-rempah dimasa lalu juga ada yang berasal dari daerah Parsi yang beragama Islam. Selain itu letak yang berdekatan dengan kerajaan Islam Samudera Pasai di Aceh, mempengaruhi komposisi agama penduduk. Pada tahun 1990 penduduk Kotamadya Padang yang beragama Islam adalah 98%, Kristen 1,6%, Hindu 0,003% dan Budha 0,26% dari seluruh jumlah penduduk.

Dalam perjalanan waktu sampai saat ini, Kotamadya Padang telah berhasil meraih beberapa penghargaan dari Pemerintah RI. Diantaranya adalah penghargaan Adipura atas prestasinya dalam peningkatan perbaikan kebersihan kota. Oleh sebab kota ini dapat mempertahankan prestasi tersebut selama lebih dari 5 tahun, maka penghargaan ini meningkat menjadi Adipura Kencana. Begitu pula atas prestasinya di dalam bidang ketertiban lalu lintas kota, sejak tahun 1992 kotamadya Padang juga telah mendapat penghargaan Wahana Tata Nugraha.

Prestasi-prestasi yang telah dicapai Kotamadya Padang tersebut, tidak terlepas dari kesatuan kerjasama tiga golongan penduduk kota, yaitu pemuka adat, alim ulama dan golongan cendekiawan. Ketiga golongan penduduk ini, merupakan golongan penduduk yang dihormati dan disegani oleh masyarakat Kotamadya Padang, sehingga melalui merekalah pendekatan oleh pemerintah setempat dilakukan.

Kualitas Hidup Penduduk Kotamadya Padang

Dalam usaha mengadakan pengukuran kualitas hidup penduduk Kota-madya Padang, maka komponen-komponen pengukurannya disajikan dalam bentuk tabel statistik. Komponen-komponen tersebut meliputi:

Juni 1996

1. Komponen Ekonomi

Dari data dalam Tabel 1.1 tampak bahwa perkembangan produk Domestik Regional Bruto Kotamadya Padang cukup pesat. Selama tahun 1983 sampai dengan tahun 1992 pertumbuhannya rata-rata 8.71%. Bidang yang paling besar memberikan kontribusi adalah perdagangan. Sedangkan perkembangan jumlah perusahaan dalam 5 tahun terakhir pada tabel 1.2 tampaknya juga cukup besar, rata-rata 20.18%. Dari kedua tabel di atas terlihat bahwa bidang ekonomi untuk kurun waktu lima tahun terakhir (1988-1993), Kotamadya Padang mengalami pertumbuhan yang cukup pesat.

Tabel 1.1
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto

No.	Pertanian	1983-1988	1983-1991	1988-1992	1988-1993
01.	Pertanian	3,54	3,87	4,42	14,40
02.	Pertambangan	14,93	14,92	14,90	-
03.	Industri	7,35	9,08	11,95	19,10
04.	Bangunan	4,56	3,59	1,98	9,80
05.	Listrik/Air Minum	15,50	14,11	11,84	8,20
06.	Angkutan	5,56	5,69	5,91	22,70
07.	Perdagangan	25,86	13,04	8,85	12,90
08.	Bank/Lembaga Keuangan	5,56	5,57	5,59	10,90
09.	Pemerintahan	9,48	8,44	6,74	12,50
10.	Sewa Rumah	2,14	2,83	3,99	9,10
11.	Jasa-jasa	7,96	6,52	4,16	13,40

Sumber: Padang dalam Angka 1994, hal. 266.

Tabel 1.2
Jumlah Perusahaan Perdagangan Menurut Skala Usaha

Tahun	Besar	Menengah	Kecil	Jumlah
1988	614	2.722	5.617	8.953
1993	712	3.982	8.142	12.836

Sumber: Padang Dalam Angka 1994, hal. 163.

2. Komponen Politik

Menurut Ben Chich Liu, ukuran kualitas penduduk dalam bidang politik terletak pada profesionalisme pemerintahan lokal yang dalam tulisan ini diukur melalui tingkat pendidikan pegawai pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Padang. Alasan diambilnya indikator tingkat pen-

didikan untuk mengukur profesionalisme aparat pemerintahan lokal, karena wawasan profesionalisme aparat pemerintah daerah tersebut dipengaruhi oleh tingkat pendidikan mereka.

Pada tabel 2.1 tampak terlihat adanya pengurangan jumlah pegawai negeri yang berpendidikan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 33,0% selama 4 tahun (1990-1994), sementara yang berpendidikan sarjana meningkat sejumlah 81,36%. Artinya kualitas pendidikan para pegawai Pemerintah Daerah Kotamadya Padang meningkat sehingga mengarah kepada penambahan wawasan profesionalisme para karyawan tersebut. Sementara jumlah suara yang masuk dalam Pemilihan Umum tahun 1982 mencapai 85,98% meningkat menjadi 93,78% pada tahun 1992. Jumlah ini merupakan jumlah yang cukup banyak dalam ukuran tingkat partisipasi politik penduduk kotamadya Padang, apalagi terdapat peningkatan jumlah suara yang masuk sebanyak 7,8% selama kurun waktu 10 tahun (1982-1992).

Tabel 2.1
Tingkat Pendidikan Pegawai PEMDA Kotamadya Padang

Tahun	SD	SMP	SMA	Sarjana Muda	Sarjana	Pasca Sarjana	Jumlah
1990	436	187	2.900	235	220	1	3.979
1991	358	168	1.976	240	256	2	3.000
1992	358	169	1.997	243	249	0	3.106
1993	357	162	1.983	244	253	2	2.999
1994	293	161	2.104	221	399	4	3.182

Sumber: Padang dalam Angka 1994, hal. 18.

Tabel 2.2
Jumlah Pemilih dan Suara yang Masuk pada Pemilihan Umum

Tahun	Jumlah Pemilih	Suara Yang Masuk	Suara yang Sah
1982	259.331	222.984	85,98%
1987	319.356	294.082	92,08%
1992	375.476	352.156	93,78%

Sumber: Memori Pelaksanaan Tugas Walikota Padang, hal. 91c.

3. Komponen Lingkungan

Pengukuran komponen lingkungan dilakukan melalui kualitas kadar air sungai dengan mengambil sampel air dari 2 buah sungai terbesar yang mengalir di kotamadya Padang, yaitu sungai Batang Arau dan sungai Batang Kuranji. Untuk sungai Batang Arau ternyata nilai BOD dan COD-nya cukup tinggi akibat buangan limbah rumah tangga dan industri karet yang dapat mempengaruhi biota air (ikan dan mikro organisme lainnya). Sementara itu sungai Batang Kuranji masih memenuhi persyaratan sebagai air minum, karena badan sungai tersebut belum dipengaruhi oleh limbah domestik, industri dan irigasi. (Pemda DATI I Sumbar: 1994, hal. 119).

4. Komponen Kesehatan dan Pendidikan

Tabel 4.1
Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Puskesmas Pembantu
Serta Tenaga Medis

Tahun	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Dokter	Bidan	Perawat
1991	17	46	28	79	17
1992	17	44	37	85	170
1993	19	45	26	88	178
1994	19	46	33	120	187

Sumber: Padang dalam Angka 1994, hal. 76.

Tabel 4.2
Jumlah Bayi Lahir Hidup dan Lahir Mati

Tahun	Lahir Mati	Lahir Hidup	Jumlah
1990	20	6.313	6.333
1991	19	5.902	5.921
1992	65	6.988	7.053
1993	24	10.434	22.687
1994	65	11.678	11.743

Sumber: Padang dalam Angka 1994, hal. 80.

Dalam bidang sarana kesehatan, selama 3 tahun (1991-1994) dalam Tabel 4.1. terlihat terjadi peningkatan jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebanyak 0,11%, sedangkan jumlah tenaga medis juga mengalami peningkatan, seperti dokter sebanyak 0,17%, bidan 41% dan perawat sebanyak 170%. Peningkatan ini ternyata tidak diimbangi dengan penurunan jumlah kelahiran hidup. Tercatat pada tahun 1990 dari seluruh bayi yang lahir 0,33% meninggal. Angka ini meningkat menjadi 0,55% pada tahun 1994. Seperti terlihat dalam Tabel 4.2.

Dalam bidang sarana pendidikan, secara umum kotamadya Padang meningkat. Tercatat dalam Tabel 4.3. pertambahannya sebanyak 5,48% untuk semua tingkat pendidikan (dari Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Menengah Atas). Sementara kualitas penduduk menurut tingkat pendidikan tercatat pada Tabel 4.4. mayoritas (19,18%) tamatan SLTA. Suatu jumlah yang cukup baik untuk tingkat pendidikan penduduk suatu kota.

Tabel 4.3
Jumlah Sarana Pendidikan Menurut Tingkatan

Tahun	TK	SD	SMP	SMTA	Jumlah
1990	6.413	99.616	34.404	38.569	179.002
1994	7.362	116.290	38.764	34.346	189.400

Sumber: Padang dalam Angka 1994, hal. 55.

Tabel 4.4
Penduduk 10 Tahun ke Atas Tahun 1993
Menurut Pendidikan (dalam ribuan)

Tdk Pernah Sekolah	Tidak Tamat SD	Tamat SD	SLTP	SLTA	Akademi	Sarjana	Jumlah
17,6	127,3	119,6	95,7	164,9	11,2	16,5	553,0

Sumber: Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 1994, hal. 54.

5. Komponen Sosial

Di dalam bidang kriminalitas, yang merupakan tolok ukur komponen sosial, tercatat dalam Tabel 5.1. adanya penurunan jumlah kejahatan yang terjadi di kotamadya Padang selama kurun waktu 5 tahun (1989 sampai 1994). Penurunan tersebut di dalam angka persen sejumlah 6,7%.

Tabel 5.1
Tindak Kejahatan/Kriminalitas yang terjadi

Tahun	Jumlah Pelanggaran
1989	1.807
1994	1.692

Sumber: Padang Dalam Angka 1994, hal. 104,
dan Padang dalam Angka 1989, hal. 149-150.

Penutup

Pengukuran kualitas hidup penduduk suatu kota tidak akan begitu berarti manfaatnya tanpa kita membandingkannya dengan kota-kota sejenis lainnya. Kota-kota di Indonesia, ciri perkembangannya dilatarbelakangi oleh perkembangan kolonialisme yang masuk ke Indonesia di masa lalu. Hal ini tentu akan mengakibatkan munculnya gejala yang berbeda dari perkembangan tiap-tiap kota di Indonesia. Misalnya bila kita membandingkan kota Padang dengan kota Jakarta. Hans Dieter mencatat bahwa integrasi kotamadya Padang ke dalam sistem dunia berjalan amat lambat, mengiringi lambatnya perkembangan tingkat perekonomiannya, jauh bila dibanding dengan kota Jakarta (Hans-Dieter Evers: 1993, hal. 43-66).

Di sisi lain, cukup penting kiranya bila kita harus mengetahui seberapa jauh perkembangan tingkat kualitas hidup penduduk suatu kota selama kurun waktu tertentu. Tesis yang diajukan oleh Ben-Chich Liu tentang pendekatan pengukuran kualitas hidup penduduk kota melalui 5 komponen, mungkin satu cara jitu untuk mengukur perkembangan kualitas hidup penduduk kota. Namun demikian, selanjutnya akan muncul pertanyaan: apakah ke 5 komponen tersebut benar-benar dapat mewakili tingkat kualitas hidup penduduk suatu kota? Hal ini dikarenakan definisi konsep tentang "kualitas hidup kota" merupakan suatu konsep yang bersifat multi dimensional. (Edward Krupat: 1985, hal. 32). Misalkan, bila dalam komponen ekonomi (menurut Bend-Chich Liu) suatu kota dianggap baik, hal ini tentu saja tidak memberikan jaminan bahwa telah adanya kualitas hidup yang baik dalam bidang ekonomi dari penduduk kota tersebut. Begitu pula gambaran mengenai ukuran yang baik mengenai lingkungan, juga tidak menjamin kemantapan dalam bidang kesehatan atau pendidikan. Begitu pula dengan tingginya jumlah penduduk kota yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum tahun 1992 di Kota-

madya Padang yang berjumlah 93,78%, tentu saja tidak dapat dijadikan ukuran bahwa partisipasi dan pendidikan politik penduduk kotamadya Padang sudah berjalan dengan baik. Masih harus dikaji kembali apakah yang terjadi di kotamadya Padang tersebut adalah partisipasi politik atau mobilisasi politik penduduk yang direkayasa oleh para aparat birokrat setempat.

Bila kita melihat tingkat perkembangan kualitas hidup penduduk Kotamadya Padang melalui sudut pandang pendekatan yang telah dibuat oleh Ben-Chich Liu di muka (terlepas dari kritik yang ditujukan kepada pendekatan tersebut), maka secara umum kita dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi peningkatan kualitas hidup penduduk kotamadya Padang selama masa tahun 1990-1994. Hal ini juga ditandai dengan diraihnya penghargaan dari pihak Pemerintah Indonesia berupa "Adipura Kencana" dan "Wahana Tata Nugraha" terhadap kotamadya Padang.

Sebagai kota bandar di kawasan jalur lalu lintas laut antara benua Asia dan Nusantara dilatarbelakangi oleh kegiatan perdagangan rempah-rempah dan sistem kolonialisasi (dimasa lalu), kotamadya Padang tumbuh menjadi kota yang bersifat multi-etnik, disamping kuatnya budaya lokal yang tetap bertahan. (Hans-Dieter Evers, hal. 133). Keberadaan budaya lokal disamping budaya "asing" yang datang setelah itu, menghasilkan beragam simbol yang muncul pada masyarakat kotamadya Padang. (Freek Colombijn: 1994, hal. 330-333). Simbol-simbol ini menurut Freek Colombijn diantaranya diwujudkan melalui hasil budaya dalam bentuk kebudayaan material seperti monumen, bentuk rumah adat dan sebagainya.

Menurut saya, penyaluran hasrat yang didorong oleh dasar budaya merupakan kebutuhan yang amat esensial, mengingat tiap masyarakat pasti memiliki budaya yang harus mereka ekspresikan. Sampai seberapa bebas masyarakat tersebut dapat mengekspresikan budaya mereka dalam bentuk yang lebih konkrit, saya pikir dapat menjadi tolok ukur seberapa baik kualitas hidup pemilik kebudayaan tersebut dalam pemenuhan kebutuhan mental mereka. Dengan perkataan lain, aspek kebebasan mengekspresikan simbol-simbol budaya (sebagian atau keseluruhan) merupakan bagian dari kebutuhan hidup manusia yang juga perlu diukur untuk mengetahui tingkat kualitas hidup dari pemiliknya.

Daftar Pustaka

Colombijn, Freek., *Patches of Padang: The History of an Indonesian Town in the Twentieth Century and the Use of Urban Space*. Netherlands: Leiden University, 1994

Juni 1996

Ever, Hans-Dieter., *Sosiologi Perkotaan*, Jakarta: LP3ES, 1982

Ever, Hans-Dieter., *Perkembangan Kota Padang: Dalam Jurnal Pembangunan dan Perubahan Sosial Budaya*, Padang: Pusat Studi Pembangunan Unand Padang.

Krupat, Edward., *Urban Characteristic: City Versus City and City Versus Town. Dalam People in Cities*, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1985

Pemda Kotamadya Padang., *Padang Dalam Angka 1991*, Padang: Kotamadya Padang, 1991

Pemda Kotamadya Padang., *Memori Pelaksanaan Tugas*, Padang: Kotamadya Padang, 1993

Pemda Kotamadya Padang., *Padang Dalam Angka 1994*, Padang: Kotamadya Padang, 1994

Pemda Kotamadya Padang., *326 Tahun Padang Kota Tercinta*, Padang: Kotamadya Padang, 1995

Pemda Propinsi Sumatera Barat., *Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Sumatera Barat Tahun 1994*, Padang: Pemda Sumbar, 1994

Salim, Emil., *Pengolahan Kota dan Lingkungan dalam Widyapura*, No. 6, November 1991 Halaman 3 - 9, 1991

Suparlan, Parsudi., *Struktur Perkotaan dan Kehidupan Hunian Liar dalam Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: PAU-IS-UI.

Ilmu yang bermanfaat menuntut kesabaran,
pengorbanan dan keikhlasan.